

Upaya PBB dalam Resolusi Konflik Blood Diamond di Sierra Leone Tahun 1991-2002

*(United Nations' Attempts to Resolute The Blood Diamond Conflict
in Sierra Leone 1991-2002)*

Maltha Cassandra Hilda
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mc_hilda@yahoo.com

Abstract

This research aimed to determine the United Nations efforts in conflict resolution of Blood Diamond in Sierra Leone in 1991-2002. The research used qualitative research type. The research methods used data collection and data analysis methods. The results showed that various efforts had been made as the conflict resolution to stop the conflicts caused by te seizure of diamonds and efforts to achieve peace. Many parties were involved in the resolution of this conflict, either from internal or external parties of Sierra Leone. However, the most instrumental party in the resolution of Blood Diamond conflict was the United Nations as an international organization. Based on the research results, it can be concluded that the United Nations made the conflict resolution efforts in Sierra Leone through three stages: Peacekeeping, Peacebuilding and Peacemaking and eventually the conflict could be resolved and achieved peace in 2002.

Keywords: *resolution conflict, blood diamond conflict, Sierra Leone, United Nations.*

Pendahuluan

Sierra Leone merupakan sebuah negara di Afrika Barat yang kaya akan sumber daya alam seperti berlian, rutil (sejenis bijih uranium), emas, bauksit, bijih titanium, bijih besi, dan bijih kromit. Akan tetapi keberadaan sumber daya alam yang melimpah justru menjadi bumerang bagi Sierra Leone sendiri karena begitu banyak pihak yang memperebutkan potensi alam di negara tersebut (Anonim, 2006).

Blood Diamond merupakan sebutan untuk fenomena eksploitasi berlian yang secara illegal diperdagangkan ke luar Sierra Leone dimana

proses pertambangan berlian tersebut telah merenggut ribuan nyawa dan menyengsarakan rakyat. Berlian disini pun menjadi motif bagi berbagai pihak untuk memegang kekuasaan tertinggi demi untuk menguasai tambang yang ada di wilayah Sierra Leone.

Sejak penemuan berlian di wilayah Sierra Leone bernama Distrik Kono pada tahun 1930, keadaan mulai berubah karena hal ini berimbas pada besarnya arus penambang gelap di awal tahun 1950-an dari negara-negara tetangga. Penyelundupan berlian dalam skala besar yang disebut dengan "*Great Diamond Rush*"

menyebabkan kekacauan hukum di Sierra Leone. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pihak yang terkait dalam tindak penyelundupan ini, baik dari dalam Sierra Leone maupun dari luar negeri.

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai terjadi ketimpangan di tubuh pemerintahan, korupsi mulai meluas, tingkat inflasi yang tinggi, tingkat pengangguran mulai meningkat, dan juga tidak tersedianya bahan pangan. Kondisi tersebut diperburuk dengan ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam sehingga seiring dengan menurunnya kekuasaan pemerintah, fenomena kudeta pun kerap muncul di tubuh pemerintahan. Pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh melemah dan hal tersebut dimanfaatkan oleh gerakan pemberontak melalui kelompok *Revolutionary United Front* (RUF).

Pada tanggal 23 Maret 1991, RUF menyerang sebelah timur Sierra Leone yang merupakan daerah kaya akan tambang berlian. RUF mulai mengenal strategi untuk menggunakan anak-anak sebagai tentara, melakukan banyak tindakan anarki dalam upaya melakukan teror penduduk, menyerang petani, penduduk, penambang bahkan mengamputasi tangan maupun kaki warga sipil dan menguasai tambang berlian. Berlian-berlian inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi RUF untuk membeli senjata dan amunisi (Law, 2013).

Situasi yang semakin panas memicu pemerintah untuk melakukan upaya resolusi konflik; baik upaya dari pihak internal Sierra

Leone maupun upaya berupa bantuan dari luar Sierra Leone. PBB sebagai organisasi internasional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam proses resolusi konflik *Blood Diamond* ini sehingga akhirnya pada tanggal 18 Januari 2002 pemerintah Sierra Leone resmi mendeklarasikan perang telah berakhir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di Sierra Leone dengan judul: *Upaya PBB dalam Resolusi Konflik Blood Diamond di Sierra Leone Tahun 1991-2002*.

Batasan materi berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisis serta diperlukan agar masalah yang dibahas dalam penelitian lebih fokus dan tidak melebar. Penulis memfokuskan subjek kajian pada konflik *Blood Diamond* yang meliputi upaya resolusi konflik yang dilakukan; baik dari pemerintah Sierra Leone maupun pihak luar seperti PBB yang turut membantu mencapai resolusi dalam konflik *Blood Diamond*.

Penulis menetapkan batasan waktu mulai dari tahun 1991 hingga tahun 2002 dimana dalam kurun waktu tersebut konflik di Sierra Leone mulai memanas pada tahun 1991 (disaat pemberontakan mulai dicetuskan oleh pihak RUF). Sedangkan tahun 2002 sebagai titik akhir penelitian karena upaya mewujudkan perdamaian di Sierra Leone tercapai pada tahun tersebut.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya PBB dalam resolusi konflik *Blood Diamond* di Sierra Leone pada tahun 1991-2002 serta memperoleh pembelajaran dari upaya-

upaya tersebut.

Kerangka Pemikiran

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teori resolusi konflik. Konflik *Blood Diamond* termasuk kategori konflik dengan kekerasan atau konflik maut, sama dengan konflik bersenjata tetapi juga termasuk di dalamnya kekerasan satu sisi seperti pemusnahan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata (Miall, 2002:30).

Oleh karenanya penyelesaian konflik bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka mengakhiri sebuah konflik bersenjata. Pencapaian ini mengakhiri tahapan penuh kekerasan dalam perilaku konflik di Sierra Leone melalui campur tangan begitu banyak pihak.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:

1. *Peacekeeping*

Merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peacemaking*

Merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

3. *Peacebuilding*

Merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui

proses peacebuilding diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif (Hermawan, 2007:93).

Kerangka resolusi konflik menurut Galtung mengikuti pola sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Kerangka Resolusi Konflik

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peacekeeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok "pejuang" atau para militer
Pertentangan kepentingan	<i>Peacemaking</i> (aktivitas politik)	Pemimpin / tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	<i>Peacebuilding</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

(Jamil, 2007).

PBB sebagai pihak yang berperan dalam proses resolusi konflik di Sierra Leone, berlandaskan pada 5 prinsip dalam piagamnya, yaitu:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3, Bab VI dan Bab VIII Piagam)
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam)
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam)
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam)
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Berdasarkan pada Piagam PBB terdapat berbagai cara untuk mencapai perdamaian yaitu negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, kesepakatan umum, diserahkan pada organisasi regional atau kesepakatan-kesepakatan serta berbagai cara lain yang diinginkan (United Nations, 2000 a).

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam proses mengkaji permasalahan. Penulis menggunakan metode ini karena data yang diperoleh tidak dapat diukur secara matematis/statistik melainkan hanya bersifat menggambarkan, memaparkan serta menjelaskan suatu kejadian secara apa adanya. Metode penelitian yang dilakukan penulis mencakup pengumpulan data dan analisis data sebagai hasil akhirnya. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data-data sekunder yang berarti data-data pengamatan terhadap obyek yang diteliti tidak diperoleh secara langsung, tetapi didapatkan dari jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel atau pemberitaan di media massa, karya tulis yang dianggap relevan, serta informasi yang terdapat di internet.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode tersebut agar mampu berpikir secara sistematis. Dengan demikian penulis juga harus bersikap kritis dan hati-hati dalam melakukan pembahasan sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat serta mampu

membuktikan hipotesis yang ada.

Hasil Penelitian

Terdapat 3 tahapan resolusi konflik *Blood Diamond* di Sierra Leone yang dilakukan oleh PBB yaitu:

1. Peacekeeping

Tahap ini merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Disini pihak yang netral ialah PBB dan keterlibatannya dalam membantu mengatasi konflik internal di Sierra Leone berawal pada November 1994. Saat itu Presiden Sierra Leone mengirimkan surat permohonan kepada sekjen PBB untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF. Pada Desember 1994, PBB mengadakan misi eksploratif menganalisis kasus tersebut dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa negara tersebut mengalami banyak kerusakan destruktif terutama dari segi infrastruktur yang ada (mengingat puncak konflik tersebut sudah berjalan selama 3 tahun) (UNOMSIL, 2000).

PBB menganggap bahwa lemahnya pemerintahan didukung oleh faktor eksploitasi berlian menjadi akar permasalahan di Negara tersebut. Akan tetapi proses penyelesaian konflik menjadi sedikit rumit karena konflik *Blood Diamond* merupakan konflik internal yang mempunyai dampak eksternal yang cukup serius.

PBB bekerjasama dengan *Organization of African Unity* (OAU) dan juga *Economic*

Community of West African States (ECOWAS) untuk melakukan mediasi demi mengurangi kekerasan, mencari penyelesaian dan mengembalikan kekuatan sipil. Ini merupakan tindak PBB yang dilakukan dengan dasar kewenangan DK PBB yang dapat memberikan pengesahan operasi perdamaian militer maupun non militer kepada organisasi regional untuk mencegah penyebaran konflik di wilayah yang dianggap berpotensi untuk membahayakan daerah sekitarnya. Melalui perundingan tersebut, diperoleh hasil diadakannya Pemilu Sierra Leone pada Februari 1996 dengan kesepakatan kelompok tentara yang berada di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Julius Maada Bio, melepaskan kekuasaan kepada pemenang pemilu tersebut. Ahmad Tejan Kabbah keluar sebagai pemenang, akan tetapi pihak RUF tidak menyetujui hasil tersebut karena kekuasaan negara pada saat itu sudah kembali di tangan pemerintah sipil, konflik pun terjadi lagi.

Pada Agustus 1997 DK PBB mengeluarkan Resolusi 1132 mengenai pemberlakuan sanksi terhadap junta *Armed Forces Revolutionary Council* (AFRC), larangan segala bentuk impor terhadap peralatan militer dan minyak ke Sierra Leone, himbauan kepada semua negara anggota untuk menyediakan bantuan baik secara teknis maupun logistic, serta membantu ECOWAS dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya atas implementasi dari resolusi konflik ini. ECOWAS juga diberi wewenang oleh PBB untuk menjamin pelaksanaan embargo dengan

menggunakan pasukan *Economic Community of West African States Ceasefire Monitoring Group* (ECOMOG) (United Nations, 2000 b).

Penempatan pengawas perdamaian (dikenal dengan sebutan *the blue helmet*) di lapangan dilakukan guna mencegah kemungkinan konflik terjadi lagi dan juga membangun rasa saling percaya di wilayah konflik. Pelucutan senjata preventif merupakan usaha untuk mengurangi jumlah senjata ringan di wilayah-wilayah konflik. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan demobilisasi kekuatan-kekuatan bersenjata dan pengumpulan serta penghancuran senjata mereka yang terlibat sebagai bagian menyeluruh dari perjanjian damai, seperti halnya terjadi di wilayah-wilayah lainnya dalam kasus konflik yang beragam. Menghancurkan senjata-senjata akan mencegah pemanfaatannya dalam peperangan di kemudian hari.

Negara-negara yang turut berpartisipasi dalam operasi tersebut memperoleh kompensasi dari anggaran khusus pengawasan perdamaian meskipun dengan tingkatan yang standar. Dalam operasi *peacekeeping* PBB melibatkan beberapa komponen, diantaranya komponen militer yang terdiri dari *peacekeeping forces* (blue helmet), pemantau militer, petugas sipil dan dibantu oleh staf-staf lokal maupun internasional. *Peacekeeping forces* sendiri merupakan pasukan multinasional yang berasal dari negara-negara anggota. Pemantau militer dan petugas polisi berasal dari negara anggota yang ditugaskan dan rekrut di bawah PBB.

2. *Peacemaking*

Pada tahap ini merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Pada November tahun 1996 dilakukan negosiasi kembali yang membahas mengenai perjanjian damai dengan pihak RUF (yang pada saat itu dibawah pimpinan Sankoh). Perjanjian antara pihak RUF dan pemerintah Sierra Leone ini disebut “Perjanjian Damai Abidjan (Abidjan Accord)” yang isinya ialah: penetapan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang netral dan penarikan semua pasukan asing dari Sierra Leone (Adebajo, 2002:31).

Dalam kaitannya dengan konflik *Blood Diamond*, operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB dapat dikatakan telah mencakup tugas dan mandate yang baik itu dalam bentuk sederhana seperti bantuan pada kegiatan sipil, fasilitas perkantoran, dan lain-lain) dan juga bentuk yang rumit seperti negosiasi, pengawasan gencatan senjata, kontrol senjata, pengembalian pengungsi, perlindungan bantuan kemanusiaan, menjaga agar kondisi tetap aman, dan lain-lain. Tugas dan mandat tersebut dilakukan melalui peran *United Nations Observer Mission In Sierra Leone* (UNOMSIL) dan *United Nations Mission In Sierra Leone* (UNAMSIL).

Kekuatan UNOMSIL pada saat itu terdiri atas 70 pengamat militer, 15 personil medis, dan 5

penasehat polisi lokal. Selain itu, UNOMSIL juga mendapat bantuan dari 50 personel sipil dari internasional dan merekrut 40 staf lokal. Pada November 1998 dilakukan *maximum preventive deployment* yakni penempatan preventif atau penempatan para pengawas perdamaian di lapangan maksimum yang terdiri dari 41 pengamat militer, 15 personel medis, dan 3 penasehat polisi lokal serta juga didukung oleh sekitar 30 personel internasional dan 25 staff lokal. Sesuai dengan mandat dari DK PBB pada resolusi 1181, UNOMSIL mempunyai tugas-tugas berdasarkan masing-masing elemennya; yakni elemen militer dan elemen sipil (UNOMSIL, 2000).

Pasukan UNOMSIL yang tidak bersenjata, dibantu dan dibawah perlindungan dari ECOMOG, kemudian melakukan dokumentasi atas kekejaman dan pelanggaran terhadap HAM penduduk sipil oleh kelompok pemberontak. Pada tanggal 6 Januari 1999 RUF kembali menyerang Freetown dengan melakukan aksi kekerasan secara sistematis dan terorganisir seperti pembunuhan, pemerkosaan, amputasi terhadap rakyat sipil, penghancuran kota seperti pembakaran kota Freetown. Hal ini menyebabkan ditariknyanya pasukan UNOMSIL dari Freetown dan dievakuasinya ke kota Conarky serta menyebabkan berkurangnya kekuatan dari UNOMSIL baik dari elemen militer maupun elemen sipilnya (UNOMSIL, 2000).

Negosiasi kemudian dilakukan pada Mei 1999 dan pada tanggal 7 Juli 1999 seluruh pihak yang terkait dalam konflik sepakat untuk

menandatangani perjanjian di daerah bernama Lome, yang kemudian dikenal sebagai *Lome Peace Agreement* dengan kesepakatan yaitu: menghentikan aksi kekerasan dan penculikan serta untuk membentuk pemerintahan nasional di negara tersebut (UNOMSIL, 2002).

Hasil dari perjanjian ini, salah satunya ialah diberikannya pengampunan (amnesti) kepada seluruh *combatans* dan hal ini mendapat kecaman dari organisasi-organisasi HAM. Selain itu dalam perjanjian ini terdapat beberapa klausul yang menyangkut adanya banyak permintaan untuk keterlibatan internasional (khususnya PBB), dalam implementasi peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut dan diperlukannya suatu peningkatan substansi pada peran dari UNOMSIL dan juga peningkatan sumber daya manusia di dalamnya, untuk mengawasi pengimplementasian perjanjian tersebut (Meijer, 2000).

Pada tanggal 20 Agustus 1999, DK PBB mengeluarkan resolusi no. 1260 (1999), yang menyetujui perluasan peran substansi politis, urusan sipil, informasi, perlindungan hak asasi dan hak anak dari misi tersebut, serta penambahan jumlah personil UNOMSIL menjadi 210 pengamat militer, 30 personel medis dan dukungan dari 107 personel internasional dan juga merekrut 69 staff lokal. Penambahan tersebut juga dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapannya, seperti perlengkapan administratif dan bantuan perlengkapan medis. Selama menjalankan tugasnya, UNOMSIL memiliki peran yang cukup penting dalam konflik *Blood Diamond* ini karena

telah membantu pengawasan gencatan senjata serta mengajak pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan konflik melalui meja perundingan.

Namun demikian pada 23 September 1999 Sekjen PBB kemudian merekomendasikan kepada DK PBB untuk membentuk suatu misi baru yang mempunyai peran yang lebih luas dari tugas sebelumnya. Dalam melakukan misinya, UNOMSIL mengalami tiga kali perpanjangan mandate hingga akhirnya pada 22 Oktober 1999 mandat tersebut diputus dan dilanjutkan dengan misi pasukan perdamaian PBB yang baru yaitu UNAMSIL. DK PBB kemudian meresmikan UNAMSIL yang mempunyai jumlah maksimum 6000 personil, termasuk di dalamnya 260 pengamat militer yang berfungsi untuk membantu penerapan *Lome Peace Agreement* (UNOMSIL, 2000).

Adapun mandat yang diemban UNAMSIL adalah:

- Bekerjasama dengan pemerintah Sierra Leone dan juga pihak-pihak yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian dalam hal implementasi / pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut.
- Membantu Pemerintah Sierra Leone pada implementasi dari pelucutan senjata, demobilisasi / pembubarisan pasukan dan rencana reintegrasi.
- Memastikan jaminan kesehatan / sekuritas dan kebebasan untuk melakukan operasi bagi para personel PBB.
- Mengamati dan mengawasi pihak-pihak yang terkait pada kesepakatan untuk melakukan

gencatan senjata sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang dilakukan 18 Mei 1999.

- Memberikan semangat kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat membangun suatu mekanisme rasa saling percaya satu sama lain untuk menciptakan mekanisme bangunan kepercayaan dan untuk menciptakan mekanisme bangunan kepercayaan dan untuk mendukung perencanaan mereka tersebut.

- Memudahkan dan memberikan fasilitasi dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan.

- Memberikan dukungan terhadap operasi-operasi yang dilakukan oleh pejabat sipil PBB, termasuk Utusan Khusus dari Sekjen PBB dan juga stafnya, serta para personel HAM dan personel utusan sipil dari PBB.

- Menyediakan bantuan dan dukungan, dalam rangka mengadakan pemilu sesuai dengan konstitusi yang akan berlaku di Sierra Leone (UNAMSIL, 2002 b).

Pada dasarnya UNAMSIL memiliki mandat yang tidak jauh berbeda dengan UNOMSIL, namun DK PBB memberikan tugas lain kepada UNAMSIL yakni untuk melakukan tindakan yang dianggap penting dalam rangka memenuhi tugas tambahan tersebut. Selain itu terlepas dari mandat yang diemban, UNAMSIL diijinkan untuk mengambil tindakan yang memang dianggap penting dalam menjamin situasi keamanan dan kebebasan dari personil-personilnya untuk beroperasi serta untuk mampu mengusahakan dan memberikan perlindungan kepada warga sipil dari

adanya ancaman kekerasan perang dan fisik, serta membawa mereka agar hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah Sierra Leone (UNAMSIL, 2002 b).

UNAMSIL dapat dikatakan sebagai sebuah pasukan perdamaian yang sukses karena sesuai mandatnya, pasukan ini berperan dalam melucuti beribu-ribu mantan pemberontak dengan bekerja sama dengan pasukan organisasi regional yaitu ECOMOG. Pada bulan Mei 2000 UNAMSIL juga telah berhasil mengumpulkan 12.695 senjata dan 253.535 amunisi (UNAMSIL, 2002 a).

Akan tetapi, pada bulan yang sama pula misi ini hampir gagal karena RUF menculik sekitar 100 orang staf UNAMSIL dan juga membunuh 4 staff. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak itu mengakibatkan komunitas internasional melakukan penekanan kepada kelompok pemberontak untuk mematuhi gencatan senjata serta menjatuhkan sanksi untuk melawan pihak-pihak yang mendukung RUF.

DK PBB kemudian memerintahkan UNAMSIL untuk bertindak tegas untuk menyerang kelompok pemberontak tersebut dan juga meningkatkan kekuatan kembali pada tanggal 19 Mei 2000 menjadi 13.000 pasukan untuk membantu memulihkan keadaan di Sierra Leone. Pada Juli 2000 UNAMSIL kemudian melakukan operasi penyelamatan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang masih disandera kelompok RUF. Pertempuran yang dilakukan UNAMSIL itu dianggap berhasil karena mereka berhasil menangkap pemimpin kelompok RUF dan

kemudian diserahkan pada aparat kepolisian. Selain itu UNAMSIL juga berhasil membebaskan sekitar separuh dari sandera yang telah ditangkap RUF.

UNAMSIL dibantu oleh sebuah LSM di Sierra Leone yaitu *Community Arms Collection and Destruction* (CICAD) dan juga komponen militer *Sierra Leone Police* (SLP) untuk melakukan program pelucutan senjata di Sierra Leone. Keterlibatan CICAD dalam penanganan kasus *Blood Diamond* ini menunjukkan bahwa selain dengan organisasi regional, PBB juga membutuhkan LSM untuk mengatasi peredaran senjata kecil dan ringan di Sierra Leone. Keterlibatan SLP dalam hal mengatasi peredaran senjata ini juga berperan penting dalam operasi perdamaian PBB.

Pada awal tahun 2002 UNAMSIL telah melakukan pelucutan senjata dan demobilisasi terhadap 75.000 mantan pasukan pemberontak, termasuk juga di dalamnya adalah para tentara anak. Misi PBB di Sierra Leone melalui UNAMSIL adalah yang terbesar dari 15 operasi PBB pada kurun 5 tahun terakhir masa konflik berlangsung (1997-2002), dengan 16.654 personel militer pada akhir September, termasuk 839 tentara Zambia (Anonim,2008).

3. Peacebuilding

Melalui tahap ini, proses penyelesaian konflik dilakukan dengan adanya proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial,

politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

UNAMSIL juga telah membantu mengadakan pemilihan nasional, membantu membangun kembali kekuatan polisi lokal negara tersebut dan berkontribusi dalam merehabilitasi infrastruktur dan memberikan rakyat setempat bantuan-bantuan dari pemerintah. PBB juga membantu pemerintah untuk menghentikan perdagangan ilegal dan mengatur industri perdagangan tersebut. Selama masa peperangan tersebut kelompok pemberontak telah mengambil dan menggunakan keuntungan materi dari berlian untuk membeli persenjataan yang akan digunakan selama masa konflik. UNAMSIL telah mengawasi dan melatih penduduk Sierra Leone dalam hal yang berkaitan dengan HAM dan menyediakan instrumen untuk merancang Pengadilan Khusus terhadap Sierra Leone untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran serius terhadap HAM; seperti telah disepakati dalam penandatanganan *Abidjan Peace Agreement* pada tanggal 30 November 2000. Anggota-anggota pihak yang bertikai melalui mekanisme ini juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission* / TRC (United

Nations, 2006).

DK PBB juga memberlakukan sanksi terhadap konflik perdagangan berlian, melarang impor terhadap komoditas berlian dari Sierra Leone. Larangan tersebut diberlakukan terhadap negara-negara anggota PBB selama 18 bulan; kecuali berlian-berlian yang memiliki sertifikat yang baru ditetapkan oleh pemerintah Sierra Leone. Pada tahap ini PBB juga membantu untuk mengatur pemilihan umum di Sierra Leone secara adil, dengan cara menyediakan bantuan logistik, bantuan informasi bagi masyarakat. Dalam mengatur dan mengadakan pemilihan umum di Sierra Leone, PBB bekerjasama dengan komisi pemilihan umum nasional / *National Electoral Commission* (NEC) dengan hasil Ahmad Tejan Kabbah menjadi presiden dengan jumlah suara terbanyak 70% pada awal tahun 2002 (United Nations, 2006).

Pada 18 Januari 2002 Pemerintah Sierra Leone melalui Presiden Kabbah mendeklarasikan bahwa perang tersebut secara resmi berakhir. Dua tahun kemudian misi ini juga memberikan bantuan yang sama terhadap pemilihan pemerintahan lokal. Selain peran-peran yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, PBB juga mempunyai peran lain dalam konflik *Blood Diamond* yakni dalam hal bantuan kemanusiaan. PBB merupakan pemberi bantuan darurat dan bantuan jangka panjang terbesar, pendorong bagi tindakan pemerintah dan badan-badan bantuan, serta bertindak sebagai penasihat keamanan bagi dunia internasional atas nama penduduk yang mengalami keadaan darurat

(UNAMSIL,2002).

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya UNIOSIL (*United Nations Integrated Office in Sierra Leone*) yang merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran *Peacebuilding*; dimana seluruh unsur PBB seperti agensi-agensi, donasi, dan program yang dimilikinya untuk bekerja bersama-sama demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup dari rakyat Sierra Leone melalui pembangunan di segala bidang kehidupan; mulai dari ekonomi, sosial, serta infrastruktur. Selain itu juga dilakukan pembangunan pemerintahan yang demokratis dan transparan, jaminan keamanan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Melalui campur tangan PBB, akhirnya konflik di Sierra Leone dapat terselesaikan dan mencapai perdamaian. Adapun tahapan resolusi konflik yang dilakukan oleh PBB dalam konflik *Blood Diamond* di Sierra Leone adalah: *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*.

Peacekeeping dimana tahap ini dimulai semenjak Presiden Sierra Leone mengirimkan surat permohonan kepada sekjen PBB untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF. Misi eksploratif mulai dilakukan dan PBB mulai menganalisa tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya dengan bekerja sama dengan OAU, ECOWAS dalam menempuh langkah-langkah menuju perdamaian;

Peacemaking yang mana pada tahap ini dilakukan mediasi, negosiasi seperti Perjanjian

Damai Abidjan (*Abidjan Accord*), pengawasan gencatan senjata, kontrol senjata, pengembalian pengungsi, perlindungan bantuan kemanusiaan, penjagaan agar kondisi tetap aman, dan lain-lain. Tugas dan mandat tersebut dilakukan melalui UNOMSIL dan UNAMSIL dengan mengemban berbagai mandat dari Dewan Keamanan PBB, termasuk terbentuknya *Lome Peace Agreement* untuk menghentikan aksi kekerasan dan penculikan serta untuk membentuk pemerintahan nasional di negara tersebut;

Peacebuilding merupakan tahap dimana UNAMSIL membantu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. UNAMSIL membantu mengadakan pemilihan nasional, membantu membangun kembali kekuatan polisi lokal negara tersebut dan berkontribusi dalam merehabilitasi infrastruktur dan memberikan rakyat setempat bantuan-bantuan dari pemerintah. PBB membantu mengembalikan kondisi keamanan maupun infrastruktur bahkan setelah 18 Januari 2002 saat Pemerintah Sierra Leone melalui Presiden Kabbah mendeklarasikan bahwa perang tersebut secara resmi berakhir.

Daftar Pustaka

Buku

- Adebajo, A. 2002. *Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra Leone, and Guinea-Bissau*, London:Lynne Rienner.
- Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Miall, Hugh dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta:PT Raja Grafindo

Persada.

Internet

- Anonim. 24 Januari 2006. *Background of Sierra Leone*. Dikutip dari <http://geography.about.com/library/cia/blcsieraleone.htm> [13 September 2013].
- Anonim. 2 Januari 2008. *Misi PBB di Sierra Leone*. Dikutip dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/08/luas07.html> [8 Januari 2015].
- Law, Dani Putra. 20 Juni 2013. *Kasus Penggunaan Tentara Anak di Sierra Leone: Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Nasional*. Dikutip dari <http://daniputralaw.blogspot.com/2013/06/kasus-penggunaan-tentara-anak-di-sierra.html>. [28 Juni 2015].
- Jamil, M.Mukhsin. 14 Oktober 2007. *Resolusi Konflik : Berbagai Model dan Strategi*. Dikutip dari <http://iwmc.blogspot.com/2007/11/resolusi-konflik-berbagai-model-dan.html>. [10 Oktober 2013].
- Meijer, Guus. 14 December 2000. *“Reconstructing Peace in Sierra Leone: Some Civil Society Initiatives”*, Center for Development Research (ZEF Bonn): *Facing Ethnic Conflicts*. Dikutip dari http://www.zef.de/download/ethnic_conflict/meijer.pdf [27 Maret 2015].
- United Nations. 2000 a. *United Nations in Sierra Leone*. Dikutip dari <http://www.un.org/aboutun/charter/> [26 Maret 2015].
- United Nations. 2000 b. *UN Documents*. Dikutip dari <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOG/GEN/N97/267/13/PDF/N9726713.pdf?OpenElement>. [31 Maret 2015].
- United Nations. 2006. *Sierra Leone – Fact and Figures*. Dikutip dari <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/facts.html> [15 Maret 2015].

United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL). 2002 a. *Background*. Dikutip dari <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/background.html> [15 Maret 2015].

United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL). 2002 b. *Mandate*. Dikutip dari <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamsil/mandate.html> [15 Maret 2015].

United Nations Observer Mission In Sierra Leone (UNOMSIL) .2000. *Background*. Dikutip dari <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil1/UnomsilB.htm>. [23 Maret 2015].

United Nations Observer Mission In Sierra Leone (UNOMSIL). 2002. *Lome Peace Agreement* Dikutip dari <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm#LOME> [28 Maret 2015].

